

Bab III

Demokratisasi Pada Masa Pemerintahan Khatami

Revolusi Islam Iran yang berasaskan agama (madzhab Shiah), dianggap menggugat legitimasi sistem negara bangsa (*nation state*) yang telah eksis di muka bumi ini sejak abad ke-19 lalu. Iran berbeda dengan negara Israel dan Pakistan yang juga menggunakan asas agama, tetapi dua negara yang terakhir itu lebih diterima masyarakat internasional khususnya barat karena struktur sosial dan politik dua negara itu tetap menggunakan konsep Barat.

Namun Republik Islam Iran tampil dengan bentuknya sendiri, yaitu sebuah negara berasaskan agama atau persisnya madzhab Shiah dua belas Al Dja'fari, dan *Vilayat-I Fakhir* sebagai sumber kekuasaan yang memberi wewenang kepada seorang pemimpin spritual revolusi menjalankan kekuasaan itu.

Pada awal era revolusi, Republik Islam Iran mengalami kesulitan berkomunikasi dengan masyarakat internasional, apalagi pemimpin revolusi Ayatollah Khomeini saat itu mengumandangkan slogan “tidak Barat, tidak Timur” yang dimaksudkan anti-Amerika Serikat dan Uni Soviet waktu itu.¹ Namun setelah dua dekade revolusi Iran itu, pemimpin Iran dan dunia mulai tampak ada upaya rekonsiliasi yang dimulai sejak masa Presiden Hashemi Rafsanjani. Proses rekonsiliasi itu diharapkan semakin cepat pada era Presiden Muhammad Khatami ini. Banyak negara barat saat ini ingin menjalin hubungan dengan pemerintah Khatami sebagai upaya mereka mendukung kubu reformis melawan kubu konservatif di Iran sekarang. Karena upaya kubu reformis untuk menciptakan sistem multi-partai,

¹ Musthafa Abd. Rahman, *Iran Pasca Revolusi : Fenomena Pertarungan Kubu Reformis dan Konservatif*, Buku Kompas, Jakarta, 2003 hal.23

liberalisasi ekonomi, sosial dan budaya menemukan momentum persamaan dengan kepentingan negara-negara Barat.

Namun misi reformasi pemerintahan Presiden Khatami itu bukan tanpa risiko. Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Presiden Khatami bisa jadi akan kehilangan simpati dari organisasi-organisasi keagamaan penganut paham neo-fundamentalisme yang sangat antibarat. Selain itu juga dalam waktu yang sama, bisa muncul organisasi keagamaan atau negara Islam di Timur Tengah atau kawasan lain, yang mengadopsi konsep Khatami. Jika konsep Khatami kelak mampu melampaui batas negara Iran, maka akan terjadi suatu peningkatan peran regional negara Iran seperti yang diidamkan pemimpin revolusi Ayatullah Khomeini, namun dengan wajah Iran yang berbeda sama sekali.

A. Struktur Politik dan Pemerintahan Republik Islam Iran

Dilihat dari model pemerintahan, Iran menganut sistem pemerintahan Republik, yang sudah dimodifikasi menjadi *Vilayat-I Faqih* (pemerintahan para ulama). Yang tetap menjaga keselarasan Trias Politika. Tampak bahwa Republik Islam Iran (RII) bisa dikatakan sebagai negara “teodemokrasi”, yaitu sistem politik yang menggabungkan pemerintahan oleh hukum Tuhan (syariah) dengan demokrasi yang berbasiskan partisipasi rakyat. *Vilayat-I Faqih*, antara lain melalui Dewan Wali yang merepresentasikan otoritas. Sementara parlemen dan pemilu, merupakan representasi musyawarah.²

² Yamani, *Antara Al-Farabi dan Khomeini : Filsafat Politik Islam*, Mizan, Bandung, 2002, hal.132

a. Konstitusi Iran

Iran menyebut diri sebagai negara yang menganut sistem *Vilayat-I Faqih* (kepemimpinan para ulama ahli hukum fiqh memang berarti hukum). Lagi-lagi, di pusat otoritas tertinggi negara adalah hukum, betapa pun hukum itu adalah syaria Islam, karena secara teoritis Iran merupakan negara yang berbasis konstitusi, dan *Vilayat-I Faqih* merupakan bentuk konstitusi modifikasi pemerintahan Iran.

b. *Wali Faqih*

Selanjutnya, negeri ini secara eksplisit menganut sistem republik yang bukan saja menerapkan konsep *Trias Politika* secara penuh dan modern (pemisahan tegas lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif) tetapi juga mengandalkan sistem pemilu terbuka guna memilih pemimpin mereka. Di Republik Islam Iran sedikitnya ada tiga pemilu yang diselenggarakan langsung (memilih orang), yakni memilih anggota parlemen, presiden, dan Dewan Ahli (Majlis-e Khubregan). Yang terakhir ini adalah suatu dewan yang terdiri dari ulama senior yang berwenang memilih *Wali Faqih* sebagai pemimpin spiritual tertinggi.³ Memang, pemimpin spiritual negeri ini mendapatkan legitimasinya dari sebuah dewan yang seluruh anggotanya dipilih rakyat. Dengan demikian, secara praktis, ia bisa diberhentikan oleh Dewan Ahli ini. Wali Faqih juga diberi kewenangan antara lain ; kekuasaan untuk mengangkat otoritas

³ *ibid.*,

yudisial tertinggi dan panglima angkatan bersenjata, kekuasaan untuk menyatakan perang dan damai, kekuasaan untuk memobilisasi angkatan bersenjata dan kekuasaan untuk memecat presiden.

Founding fathers republik itu percaya, jabatan pemimpin spiritual adalah jabatan terspesialisasi yang membutuhkan kualifikasi tertentu, antara lain, penguasaan atas syariah. Yang memilih harus orang-orang yang juga memiliki kualifikasi atau spesialisasi yang sama, yaitu kaum ulama. Meski berwenang menunjuk sebagian anggota Dewan Wali (*Syura-e Negahban*) *Wali Faqih* secara praktis tak terlibat penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Fungsinya lebih banyak sebagai pembimbing spiritual atau semacam ketua mahkamah agung.

c. Dewan Ahli (*Majlis-i Khubregan*)

Dewan Ahli berfungsi mengangkat *Rahbar* atau Wali Faqih. yang dipilih adalah orang bukan partai dan mereka ini sangat *accountable* terhadap konstituennya. Jika tidak ada seorangpun yang memenuhi persyaratan, Dewan Ahli yang sama akan menunjuk tiga atau lima *marja'* yang memiliki persyaratan yang diperlukan untuk membentuk Dewan Faqih.

Dewan Ahli beranggotakan sekitar 72 ahli hukum Islam yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang khusus dipersiapkan untuk tujuan ini.

d. Parlemen (*Majlis*)

Sedangkan Parlemen atau *Majlis* bertugas untuk mengesahkan menteri-menteri, meskipun yang mengusulkan itu presiden. Parlemen bisa menolak karena memang mempunyai hak penuh untuk menguji calon-calon menteri yang diajukan.⁴

Anggota Parlemen banyak juga berasal dari para ulama karena dalam sistem pemilu langsung seperti yang diterapkan negeri ini, terpilihnya seseorang banyak dipengaruhi oleh jaringan-jaringan komunikasi yang ia kuasai, dan ulama-ulama sering memberikan ceramah dan memberi pengajian dimana-mana, otomatis ia banyak dikenal dan dipilih oleh rakyat. Anggotanya terdiri dari 270 orang yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam hal-hal tertentu sistem politik di Iran dilengkapi dengan mekanisme referendum. Misalnya, jika ada anggota parlemen yang meninggal dunia atau gugur keanggotaannya karena satu dan lain hal, maka diadakanlah pemilihan lagi didistrik yang bersangkutan, yakni distrik tempat anggota parlemen tersebut. Ini dikarenakan pemilihan di Iran menggunakan sistem distrik. Bila seorang anggota parlemen melakukan kesalahan pengadilan yang akan menangani kasusnya. Bila ia terbukti bersalah, berdasarkan keputusan pengadilan itulah ia kehilangan keanggotaannya. Disana tidak dikenal istilah *recalling*.

⁴ Yamani., op.cit hal 24

Seseorang menjadi anggota parlemen sampai habis masa jabatannya, yakni sampai pemilu berikutnya.⁵

e. Dewan Wali (*Shura-ye Negahban*)

Dewan Wali yang berfungsi memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan parlemen tak bertentangan dengan undang-undang dasar maupun bertentangan dengan kehendak Tuhan, lagi-lagi suatu praktik yang lazim di negara modern.

Kadang-kadang mereka juga membuat rancangan undang-undang yang sumbernya adalah kehendak Tuhan lalu disodorkan kepada parlemen untuk dirumuskan kedalam peraturan yang lebih spesifik dan praktis. Dengan demikian untuk menjadi sebuah hukum positif diperlukan pengesahan dari dewan wali. Meskipun demikian lembaga ini bukan lembaga legislatif.⁶

Dewan Ahli juga disebut Dewan Garda yang diartikan sebagai *The Council of Guardianship* atau dewan pengawal konstitusi. Pemimpin besar Revolusi Islam Iran, menetapkan enam ahli fiqih yang menjadi anggota Dewan Garda Konstitusi pertama Iran. Dewan Garda Konstitusi atau juga disebut Dewan Pengawal adalah sebuah lembaga yang bertugas memverifikasi segala hukum yang dikeluarkan oleh Parlemen Iran agar selalu sejalan dan sesuai dengan hukum syariah Islam. Tugas lain dari Dewan ini adalah mengawasi berlangsungnya berbagai pemilu dan referendum di Iran. Dewan ini

⁵ *ibid.*,

⁶ *ibid.*,

terdiri dari enam ahli fiqih (hukum agama) dan enam ahli di berbagai bidang hukum lainnya. Keenam ahli fiqih ditunjuk oleh Pemimpin Spiritual Islam Iran. Sedangkan enam ahli hukum lainnya direkomendasikan oleh Ketua Mahkamah Agung Iran, yang kemudian dipilih dan ditetapkan oleh anggota Parlemen.⁷

Dewan itu beranggotakan 12 tokoh agama dengan komposisi: enam anggota dipilih langsung oleh pemimpin spiritual Iran, dan enam orang lainnya dari ahli hukum yang dipilih Majelis Syura (parlemen) setelah dicalonkan oleh lembaga yudikatif. Artinya, secara *de facto* anggota Dewan Garda kini pasti loyalis terhadap pemimpin spiritual, yang kini dijabat Ali Khamenei. Sebab, selain Ali Khamenei memiliki hak menentukan 50 persen anggota Dewan Garda itu, lembaga yudikatif Iran hingga saat ini masih didominasi kubu konservatif. Aspirasi politik antara Ali Khamenei dan kubu konservatif jauh lebih dekat dibanding antara Ali Khamenei dan kubu reformis.⁸

Dewan Garda adalah bagian dari struktur institusi politik Iran pascarevolusi tahun 1979. Struktur institusi politik Iran pascarevolusi secara garis besar terbagi ke dalam dua lembaga politik. Yaitu, lembaga politik yang lebih bernuansa transendental dan lembaga politik yang lebih bernuansa profan.

⁷ Yamani, *op.cit.*, Hal.129

⁸ Musthafa Abd. Rahman, *op.cit.*, Hal.86

Lembaga transendental semacam *Wali Al Fakih* (pemimpin spiritual), Pengawal Tradisi, lembaga keilmuan (*Khuzah Al Ilmiah*), dan Dewan Ahli. Sedang lembaga profan seperti lembaga kepresidenan, Dewan Pengawas Kepentingan Negara, Dewan Tinggi Keamanan Nasional, Parlemen, dan Dewan Garda.

Dalam sistem dan etika politik yang berlaku di Iran, lembaga transendental jauh lebih memiliki otoritas dibanding lembaga profan dalam menentukan kebijaksanaan umum negara dan kemudian mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan tersebut.

f. Presiden

Sementara dalam kekuasaan eksekutif, kekuasaan tertinggi negara Republik Islam Iran berada di tangan Presiden yang masih berada di bawah garis kekuasaan Iman atau *Vilayat-I Faqih (Rahbar)*, yang menurut pasal 113 disebutkan bahwa: “Presiden bertanggung jawab dalam penerapan Undang-Undang Dasar, pengaturan ketiga cabang kekuasaan, dan memimpin cabang eksekutif, kecuali dalam hal-hal yang secara langsung menjadi tanggung jawab Imam atau pemimpin spiritual”. Dan berdasarkan pasal 114, “Presiden dipilih untuk masa jabatan empat tahun, dan dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Presiden hanya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan lagi secara berurutan”. Walaupun eksekutif merupakan kekuatan tertinggi negara di Iran, namun tindakan dan

kebijaksanaannya masih dapat ditolak oleh pemimpin spiritual tertinggi di Iran.

Di samping Presiden, ada pemegang kekuasaan eksekutif lain, yaitu Perdana Menteri. Menurut pasal 124, Perdana Menteri diusulkan oleh Presiden dan setelah disetujui oleh Majelis atau parlemen, baru secara resmi Presiden mengesahkan Perdana Menteri yang bersangkutan. Namun, setelah referendum amandemen konstitusi yang diadakan secara bersamaan dengan pemilihan Presiden 28 Juli 1989, jabatan Perdana Menteri dihapus, dan diganti dengan jabatan Wakil Presiden.⁹

23 tahun yang lalu, tanggal 20 Februari 1979, Imam Khomeini, Menurut anggota Majelis Syura Ali Akbar Muhtashemi, presiden bukan satu-satunya lembaga yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan konstitusi. Ia mengatakan, lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, Dewan Garda Konstitusi, dan lembaga-lembaga negara lainnya juga ikut memikul tanggung jawab bagi pelaksanaan konstitusi. Jika lembaga-lembaga itu tidak menciptakan situasi kondusif bagi presiden untuk menjalankan tugas konstitusionalnya, maka hal itu merupakan bagian dari pelanggaran konstitusi yang harus dipikul bersama oleh semua lembaga negara, bukan hanya presidenkata.¹⁰

⁹ Noor Arif Maulama, *Revolusi Islam Iran : dan Realisasi Vilayat-I Faqih*, Kreasi Wacana, 2003 hal.174

¹⁰ http://www.irib.ir/worldservice/melayuRADIO/kal_sejarah/februari/20februari.htm

g. Lembaga Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif sebagai lembaga peradilan terdiri atas Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Rendah. Menteri Kehakiman adalah menjaga hal-hal yang berkaitan dengan hubungan antara eksekutif dan legeslatif dan masalah-masalah hukum. Untuk kepala Pengadilan dan Jaksa Penuntut Umum, semuanya berasal dari ahli-ahli Syi'ah.

Menurut pasal 156 Undang-Undang Dasar Republik Islam Iran, lembaga peradilan harus merupakan kekuasaan yang independen, membela dan melindungi hak-hak individu dan sosial rakyat, juga bertanggung jawab terhadap implementasi keadilan dan harus melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:¹¹

Pertama, menguji dan memberikan keputusan yang memperhatikan dakwaan, jenis pelanggaran, pengaduan, menetapkan perkara pengadilan, menyelesaikan perselisihan dan mengambil keputusan penting serta tindakan dengan memperhatikan bagian-bagian tersebut dalam persoalan seperti status perseorangan di depan hukum. *Kedua*, memulihkan hak-hak publik atau rakyat dan meningkatkan keadilan dan kebebasan-kebebasan yang sah. *Ketiga* melakukan pengawasan atas pelaksanaan hukum yang baik. *Keempat*, mengusut kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, menjatuhkan keputusan hukum, menghukum dan melaksanakan Hodoud (hukuman

¹¹ Noor Arif, op.cit., Hal. 174-176

cambuk untuk menebus kesalahan), memperbaiki orang-orang yang bersalah, serta memberikan keadilan Islami. *Kelima*, mengambil tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencegah tindakan kejahatan dan memperbaiki para pelaku kejahatan.

Dengan demikian, Lembaga Peradilan merupakan bagian yang sangat penting untuk melindungi hak-hak rakyat selama berada dalam jalur gerakan Islam. Dan supaya tidak terjadi penyimpangan terhadap ideologi mazhab Syi'ah, maka dibuat sistem peradilan yang berdasarkan pada hukum-hukum Islam yang sesuai dengan ajaran Syi'ah. Hal ini untuk menunjukkan bahwa lembaga yudikatif di Iran mempunyai tugas dan wewenang yang hamper sama dengan negara-negara lain.

B. Pemilu 1997

Salah satu inti demokrasi adalah pemilihan umum. Negara yang menyatakan diri menganut demokrasi pasti mengadakan pemilihan umum. Apakah kemudian pemilihan umum ini hanya merupakan ritual saja atau secara substansial mencerminkan demokrasi, itu adalah persoalan kedua. Yang penting pemilihan umum memenuhi prinsip-prinsip yang disepakati.

Kemudian prinsip dewan perwakilan. Salah satu ciri demokrasi itu adalah adanya wakil rakyat, mengingat bahwa tidak mungkin semua rakyat bisa mengambil keputusan karena terlalu banyak. Oleh sebab itu, perlu ada wakil-wakilnya. Demokrasi yang langsung dari rakyat hanya bisa dijalankan

pada zaman Athena. Sekarang ini tidak mungkin lagi setiap orang berpartisipasi, dan karena itu semua negara menjalankan dewan perwakilan.

Kemudian, ciri demokrasi yang ketiga adalah pers yang bebas. Kehidupan masyarakat industri ditandaidengan semacam sistem control dari rakyat berupa pers atau opini publik. Opini public ini diwujudkan di dalam pers, maka pers harus diberikan kebebasan seluas-luasnya. Semua negara mengakui kebebasan pers. Kata "bebas" harus disebut karena merupakan prinsip yang disepakati sebagai salah satu ciri demokrasi itu.

Kemudian ada distribusi kekuasaan (*distribution of power*). Prinsip ini mungkin berasal dari khazanah klasik. Aristoteles pernah membagi pemerintahan berdasarkan distribusi kekuasaan. Kekuasaan yang dia sebut *cra-tien-kratos* berpusat pada beberapa orang, dan disebut plutokrasi. Memang menurut Aristoteles maupun Plato, bentuk pemerintahan yang paling baik adalah Platokrasi.

Sekarang pun karena demokrasi itu menunjuk banyak orang, harus ada distribusi kekuasaan. Kekuasaan itu tidak boleh berpusat pada satu orang. Konsep itu dijabarkan oleh Montesquieu dengan pemidahan tiga kekuasaan: eksekutif, yudikatif, dan legeslatif. Sekarang semua negara menunjukkan adanya pemisahan tiga kekuasaan tersebut. kabinet, lembaga perwakilan yang berwibawa, dan kehakiman yang independen merupakan ciri utama negara demokarasi.

Pemilihan Umum untuk memilih presiden di Iran yang diselenggarakan Jum'at 23 Mei 1997, memiliki kekhasan sendiri disbanding

pemilu sebelumnya, karena jumlah kandidatnya yang mencapai 238 calon, yang akhirnya menjadi empat kandidat setelah disaring, yakni ketua parlemen Ali Akbar Nateg-Nouri, mantan Menteri Kebudayaan Muhammad Khatami, Mantan Menteri Urusan Intelejen Muhammad Ali Reyshahri dan Kepala Organisasi Nasional Reza Zavarei.¹²

Dalam pemilu tersebut tidak ada satu kandidatpun yang memiliki keunggulan mencolok atas kandidat yang lain, baik dari segi kemampuan individu maupun karena dukungan dari pemimpin spiritual Ayatullah Ali Khamenei. Usia 18 tahun Revolusi Iran ketika itu membuat hubungan emosional rakyat-kandidat menyusut. Rakyat Iran kian kritis dan pragmatis melihat para kandidat. Oleh karena itu, semua kandidat berpeluang sama merebut kursi presiden.¹³

Pemilu Iran memang menganut sistem pemilu Perancis, dimana kandidat minimal harus memperoleh suara 50 persen lebih satu untuk bisa dikatakan sah sebagai pemenang. Bila tidak ada kandidat yang meraih suara 50 persen lebih satu, maka harus dilaksanakan pemilu babak kedua.¹⁴

Ali Akbar Nateg-Nouri sempat diusulkan didukung pemimpin spiritual Ali Khamenei. Namun Ali Khamenei membantah isu tersebut, menurutnya ia tidak mendukung kandidat tertentu, dan berusaha selalu menjaga jarak dengan para kandidat yang pemilihannya disahkan oleh majelis penjaga konstitusi. Khamenei akan tetap memihak kepada kandidat peraih suara

¹² Musthafa Abdul Rahman, *op.cit.*, hal.3

¹³ *ibid.*, hal 5

¹⁴ *ibid.*, hal. 15

terbanyak dan mendukung sekuat tenaga, seperti dukungannya kepada presiden Rafsanjani sebelum ini.¹⁵

Sedangkan mengenai pencalonan Khatami sebagai kandidat tentunya setelah adanya jaminan dari Ali Khamenei, karena menurut Khatami ia tidak berani mencalonkan diri sebelum bertemu langsung dengan Khamenei untuk meminta restu. Pertemuan tersebut dikatakan menyepakati beberapa hal antara lain soal memilih anggota kabinet baru, politik luar negeri dan kebijakan ekonomi yang akan dianut. Jawaban Khatami cukup menenangkan Khamenei dan menghilangkan kecemasan terjadinya ketidak harmonisan antara presiden yang memiliki otoritas luas dalam undang-undang dan pemimpin spiritual yang dianggap sumber kekuasaan dan keputusan dalam negara. Oleh karena itu, pencalonan Khatami dalam pemilu dan adanya koordinasi dengan Khamenei, membuat peluang antara Nateg-Nouri dan Khatami dinilai setara.¹⁶

1. Kemenangan Khatami

Pemilu 1997 merupakan pemilu pertama bagi kemenangan Khatami yang berasal dari kubu Reformis. Sebelumnya Iran dipimpin oleh seorang presiden yang juga berasal dari kubu Reformis selama dua periode masa pemerintahan yaitu Presiden Rafsanjani dari fraksi *Hujjatiyah*, yang sama dengan Khatami.

Dengan mengantongi 69 persen dari lebih 29 juta suara yang masuk, Khatami memenangkan pertarungan untuk menduduki kursi

¹⁵ *ibid.*, hal. 5

¹⁶ *ibid.*, hal 6

presiden Iran, mengalahkan saingannya yang berasal dari kubu Konservatif, Ali Akbar Nateg Nouri. Perubahan mendasar rupanya sedang terjadi di Iran pada saat itu. Dukungan lembaga negara ternyata bukan segalanya. Suara hati nurani rakyatlah yang menentukan. Kerinduan rakyat terhadap keterbukaan, pembaruan, dan keadilan, telah mempertemukan mereka dengan misi Khatami yang mengumandangkan isu "Toleransi, Modernisasi, dan Keterbukaan".

Rakyat Iran pada saat itu dipenuhi dengan keputusasaan terhadap janji-janji revolusi yang mulanya rakyat Iran sangat menaruh harapan besar bahwa revolusi akan membebaskan mereka dari kungkungan otoritarianisme setelah rezim Pahlevi yang *dzalim* menuju terwujudnya masyarakat islami yang adil dan makmur. Akan tetapi harapan tersebut hanya membentur ruangan hampa karena revolusi sering memakan anaknya sendiri melalui penahanan dan penyingkiran sejumlah tokoh yang berjasa bagi revolusi seperti Presiden Iran pertama *Abdul Hasan Bani Sadr*¹⁷ yang terpaksa harus hengkang ke Perancis. Sehingga janji-janji revolusi tersebut menyebabkan rakyat Iran menginginkan suatu perubahan besar dalam kehidupannya, hingga akhirnya muncul seorang Khatami yang menyuguhkan pemikiran-pemikiran yang sejalan dengan yang dimaksud masyarakat Iran.

¹⁷ Presiden Iran pertama kali, yang berasal dari kelompok Nasionalis, merupakan pembantu dekat Khomeini pada waktu berada di pengasingan, masa Rezim Pahlevi. Bani Sadr hanya menduduki kursi kepresidenan sampai dengan pertengahan tahun 1981. hal ini terjadi karena adanya pertentangan antara Bani Sadr dengan parlemen yang akhirnya Bani Sadr tersingkir dari kekuasaan dan lari ke luar negeri.

Gagasan dari Khatami yang cenderung moderat tersebut terus mendapat tanggapan positif dari rakyat Iran yang pada saat tersebut benar-benar haus akan perubahan dan pembaharuan. Hal yang wajar bila suara terbanyak untuk mendukung Khatami berasal dari kaum muda dan wanita, karena bila dilihat secara nyata dua kelompok inilah yang lebih banyak tertindas karena kepentingan mereka selalu dikesampingkan. Sedangkan kaum muda adalah tulang punggung negara yang akan meneruskan perjuangan revolusi Iran,— notabene rakyat Iran secara kuantitas jumlah wanita dan kaum mudanya lebih banyak, mengetahui hal tersebut Khatami mencari peluang dari sini untuk menggalakkan pemikirannya, dengan memusatkan strategi kampanyenya dengan sasaran para kaum muda dan wanita. Dan benar nyatanya kaum muda menjadi penentu kemenangan Khatami dalam pemilu 1997 karena hampir 70 % suara dari pemuda dan mahasiswa yang lebih banyak menginginkan perubahan.

Di setiap kampanyenya, kubu modernis selalu diperdengarkan lagu-lagu yang bercerita tentang kebebasan, selalu terdengar dialog-dialog tentang perlunya institusionalisasi nilai-nilai sipil, demokratisasi, dan tuntutan dihentikannya “pemaksaan gagasan” oleh kelompok minoritas yang begitu berkuasa.

a. Kemenangan Kubu Reformis

Suasana politik Iran semenjak kemenangan Khatami pada pemilu Presiden 1997 membawa angin segar bagi Kubu Reformis menghadapi pemilu parlemen yang dilaksanakan tahun 2000.

Namun meski begitu siapapun anggota parlemen yang terpilih tidak diragukan lagi loyalitas mereka terhadap Revolusi Iran, sebab semua calon anggota parlemen telah melalui seleksi yang sangat ketat. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui kandidat anggota Parlemen. Tahap pertama, mereka yang mencalonkan diri harus mendapat persetujuan resmi dari komite keamanan dan intelejen lokal yang biasanya dipimpin oleh ulama setempat. Tahap kedua, mereka harus memperoleh persetujuan juga dari Kemeterian Dalam Negeri. Tahap ketiga, mereka harus mendapat persetujuan lagi dari Kementerian Keamanan dan Intelijen. Tahap keempat, pencalonan mereka harus dilegalisir oleh majelis Pemelihara Undang-Undang yang (Dewan Garda) beranggotakan 12 ulama senior. Majelis tersebut sedikitnya telah menggugurkan 600 calon anggota parlemen karena diragukan loyalitasnya atau revolusi.

Kriteri utama bisa lolos menjadi calon anggota parlemen di Iran adalah mereka harus mempunyai hubungan kuat dengan revolusi. Sebagian besar calon anggota parlemen Iran sekarang pernah mengabdikan diri di jajaran revolusi, yakni milisi bersenjata yang dibentuk Bapak Revolusi Iran, Ayatullah Khomeini, untuk membela revolusi. Bahkan sejumlah dari mereka, pernah menjadi martir revolusi, seperti melakukan pembunuhan

atas musuh-musuh revolusi atau ikut menyandera diplomat AS tahun 1979.¹⁸

Maka, dalam kriteria calon anggota parlemen Iran, terdapat istilah “orang kita” dan “orang asing”. Tentu saja, mereka yang masuk kategori orang asing, pasti digugurkan pencalonannya. Oleh karena itu, pemilu tersebut tidak memilih antara kubu revolusi dan kontrarevolusi, tetapi antara dua pandangan terhadap revolusi yang dikenal dengan kubu reformis dan konservatif. Hal ini tentu sangat penting untuk mencegah adanya harapan yang berlebihan atas hasil pemilu.¹⁹

Pemilu yang berlangsung sejak Jumat, 18 Februari 1997 pukul 09.00 waktu setempat itu diikuti 38,7 juta pemilih yang akan memilih 290 wakil rakyat di parlemen lewat 3.200 tempat pemungutan suara (TPS). Jumlah wakil rakyat sebelumnya 270 orang dengan komposisi: 120 kursi dikuasai kubu konservatif, 80 kursi milik kubu reformis, dan 70 kursi lainnya diduduki kelompok independen.

Hasil awal pemilu Iran yang diumumkan mulai pukul 11.00 GMT (18.00 WIB) pada 19 Februari 1997 didominasi kubu reformis. Hingga pukul 23.45 reformis memperoleh 55 kursi dari 113 kursi parlemen yang telah diketahui pemiliknya. Kubu konservatif baru memperoleh 22 kursi, sementara kelompok independen dan kelompok yang tidak diketahui afliasinya masing-masing memperoleh 25 kursi dan 11 kursi.²⁰ Kubu reformis mengawali kemenangannya secara mengejutkan. Mereka

¹⁸ *ibid.*, hal. 51

¹⁹ *ibid.*,

²⁰ www.Kompas.com, 20 Februari 2000

merebut kemenangan di daerah pemilihan yang secara tradisional dikuasai kubu konservatif.

Ali Zadsar, tokoh garis keras dari daerah Jiroft, Propinsi Kerman selatan, tersingkir oleh kandidat reformis dukungan para pemimpin gerakan mahasiswa. Zadsar dikenal sebagai tokoh yang paling sering mengecam Presiden Mohammad Khatami, di samping menjadi salah satu tokoh yang gagal menggugat Menteri Kebudayaan Ayatullah Mohajerani ke pengadilan.

Di Ardakan, kampung halaman Khatami, tokoh reformis Mohammad Reza Tabesh, kerabat dekat dan pembantu Presiden Khatami, menyingkirkan tokoh konservatif setempat. Tetapi di kota Yazd, salah seorang pemimpin reformis justru disingkirkan salah seorang pemimpin kanan tengah.

Kubu reformis terdiri dari kelompok besar seperti Front Partisipasi Islam Iran (Islamic Iran Participation Front/IIPF), kelompok terdekat Khatami, Liga Ulama Militan (League of Militant Clerics) yang sebagian besar anggotanya adalah ulama moderat, serta Executive of Construction Party.

Kubu ini menjanjikan akan meningkatkan kebebasan pers, mereformasi lembaga pengadilan, serta mengurangi campur tangan ulama dalam pemilu mendatang. Mereka juga menyatakan akan membangun pemerintahan baru yang lebih transparan dan memperbaiki hubungan dengan AS.

“Kami ingin membangun demokrasi di Iran. Pengalaman menunjukkan, demokrasi selalu beriringan dengan reformasi di setiap tahap. Kami tidak punya pretensi seolah-olah semua bisa diselesaikan dengan kedua hal itu. Kami hanya ingin menjawab aspirasi kaum muda tanpa anarki,” tandas pemimpin IIPF Mohammad Reza Khatami, saudara kandung Presiden Khatami²¹.

mereka juga memperkenalkan program mereka yang akan mereka laksanakan pascasidang parlemen 28 Mei 2000, program tersebut adalah : pertama, mengembalikan lembaga parlemen pada fungsinya semula, yakni membuat UU baru dan meninjau lagi UU yang tidak sesuai dengan zaman. Kedua, mengubah UU pers, membatalkan pengawasan, menghapus UU yang membenarkan pembredelan, menjaga hak dan masa depan wartawan. Ketiga, mengubah UU menyangkut pengaturan partai. Keempat, memberdayakan peran massa dengan mengajukan pembentukan organisasi mahasiswa, komite khusus pemuda, memudahkan pemulangan warga Iran di Luar negeri, dan membuka peluang investasi asing. Kelima, mendukung pelaksanaan kebijakan yang menghilangkan hubungan tegang dengan negara-negara lain dan membuka dialog budaya serta agama. Keenam, mendukung pelaksanaan ekonomi yang lebih liberal di Iran, sehingga bisa lebih adaptasi dengan sistem ekonomi dunia. Ketujuh, membenahi sistem administrasi negara

²¹ www.Kompas.com 05 Juni 2001

yang lebih bertumpu pada kemampuan sumber daya manusia dan membasmi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme²².

C. Benturan Dua Kubu

Dalam kurun waktu 22 tahun semenjak revolusi tahun 1979, kunci persoalan Iran sesungguhnya adalah dapatkah dilakukan reinterpretasi atas sistem *Vilayat-I Fakihi* yang diterapkan Iran pascarevolusi tahun 1979, dari pertanyaan tersebut akan menentukan wajah masa depan Iran. Dalam konteks perkembangan politik mutakhir Iran, jawaban itu akan memberi indikasi atas hasil dari pertarungan kubu reformis dan konservatif di negeri itu saat ini.

Ironinya, elite politik Iran cenderung berbeda sikap dan pandangan tentang bagaimana format masa depan negara dalam konteks perubahan situasi yang cukup dahsyat, baik di dalam negeri maupun lingkungan internasional. Faktor inilah yang melahirkan kubu reformis dan konservatif, yang lalu mengemuka di permukaan menjelang pemilihan presiden tahun 1997.

Kubu konservatif ingin tetap mempertahankan sistem *Vilayat-I Fakihi* dengan bentuknya seperti sekarang, yang salah satu pilarnya menempatkan pemimpin spiritual sebagai penguasa sentral yang sakral. Sedangkan kubu reformis menghendaki pengurangan kekuasaan pemimpin spiritual, dengan menempatkan konstitusi di atas segalanya.

Secara institusional, kubu reformis berhasil menguasai lembaga eksekutif melalui pemilu bulan Mei 1997, dan lembaga legislatif lewat

²² Musthafa Abdul Rahman, op.cit., hal. 74

pemilu bulan Februari 2000. Keberhasilan kubu reformis menguasai dua institusi penting itu sempat memunculkan rasa optimis akan masa depan proses pembaruan di negara tersebut.

Namun, secara substansial, dominasi kubu reformis atas dua lembaga itu ternyata belum memberi dampak politik yang cukup berarti. Basis kekuatan kubu konservatif semacam lembaga yudikatif, militer, dan Pemimpin Spiritual Ali Khamenei masih mampu menunjukkan efektivitasnya dalam menjepit ruang gerak lembaga eksekutif dan legislatif.

Dengan dinamikanya sendiri, perubahan-perubahan signifikan sebenarnya terus berlangsung di Iran pada massa pascarevolusi. Perubahan-perubahan itu sering disebut para pengkaji dan pengamat Iran sebagai reformasi dan bahkan demokratisasi. Dan dalam perubahan-perubahan itu, muncul dua kubu besar, kelompok reformis pada satu pihak, dan kelompok konservatif pada pihak lain. Pada dasarnya, kubu Reformis adalah kubu Presiden Muhammad Khatami dan parlemen (*majles*) pada satu pihak yang berhadapan dengan otoritas kaum ayatullah dan mullah dalam lembaga *Vilayat-I Faki*²³ yang menggagap diri mereka sebagai pewaris Ayatullah Khomeini, *founding father* revolusi Islam Iran²⁴.

Tarik tambang dan pergumulan di antara kedua kubu terkait dengan beberapa hal. Kubu reformis misalnya menekankan “kedaulatan rakyat”, sementara kubu konservatif menekankan otoritas *Vilayat-I Faki*. Presiden

²³ Abdulaziz Sachedina, *The just Ruler (al-sultan al-'adil) in Shi'ite Islam : The Comprehensive Authority of the Jurist in imamate Jurisprudence*, Oxford University Press, NewYork, 1988. hal.173-231.

²⁴ Hamid Dabashi, *Theology of Discontent: The Ideological Foundation of The Islamic Revolution in Iran*, NewYork University Press, London, 1993. dalam Musthafa Abdul Rahman, op.cit., hal.xx

Muhammad Khatami yang terpilih dalam (1997 dan 2001) dengan landslide mutlak, masing-masing 69.1 persen dan 77 persen menyatakan, misalnya, “pemerintah ditentukan majelis (parleman). Cabang eksekutif mestilah bertanggung jawab kepada majles, Majles adalah kepala dari segala urusan, dan majles adalah manifestasi kedaulatan rakyat. Tugas terbesar majles adalah membahas dan memecahkan masalah nasional, dan masalah-masalah nasional terkait dengan masalah-masalah agama. Keragaman mestilah diterima, sehingga berbagai masalah dapat dipecahkan melalui pembahasan dan diskusi, dan suara terbanyak. Inilah dasar kemerdekaan”²⁵

Penegasan ini kemudian ditambahkan lagi oleh Presiden Khatami ketika ia menjelaskan tentang tugas presiden, yakni: membela agama resmi Republik Islam dan konstitusi; melayani rakyat dan kemajuan pembangunan; meningkatkan kemajuan agama dan akhlak; menegakkan kebajikan dan keadilan; mencegah otokrasi; melindungi kebebasan dan kemuliaan individu dan hak-hak asasi bangsa; menjaga keutuhan wilayah, politik, kebudayaan bangsa; dan memegang kekuasaan sebagai amanah suci dari rakyat Khatami²⁶. Pernyataan ini dengan tegas mengungkapkan, bahwa presiden bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada ulama (Wali Fakih).

Pernyataan-pernyataan Khatami tersebut, bisa diduga selaras dengan pandangan cendekiawan “liberal” seperti Soroush. Soroush bahkan dikenal sebagai pengkritik keras konsep *Vilayat-I Fakih* yang diterapkan di Iran pasca

²⁵ Daniel Brumberg, *Reinventing Khomeini: The Struggle for Reform in Iran*, The University of Chicago Press, Chicago & London, 2001. hal. 1. dan Mohammad Khatami, *Islam, Dialogue and Civil Society*, Center for Arab and Islamic Studies, Canberra, 2000. hal.71-86

²⁶ *ibid.*, hal. 73

Khomeini, dan kini dipertahankan mati-matian oleh para ulama. Soroush memandang konsep kekuasaan ulama ulama Syiah tersebut sebagai anachronism. Tetapi, Soroush yang menolak disebut sebagai pemikir “liberal” berhati-hati untuk mengkritik Ayatullah Khomeini yang pertama kali mengelaborasi konsep politik klasik Syi’ah tersebut dan menerapkannya di Iran pasca-Revolusi²⁷

Meski Presiden Khatami mendapat dukungan luas dari rakyat, ia menghadapi tantangan keras dari kaum mullah. Presiden Khatami memang berhati-hati untuk tidak mengkritik secara langsung dan terbuka Ayatullah Hashemi Rafsanjani, ketua majles pada 1980-an, dan presiden pada 1989-1997, yang kini menjabat sebagai pemimpin Wilayah Al Fikih. Salah satu tugas pokok lembaga keulamaan ini adalah menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di antara eksekutif (presiden) dan legeslatif (majles). Tetapi, lebih dari itu, Wilayah Al Fakih dapat menghitamputihkan Iran.

Dalam menghadapi tantangan Presiden Khatami dan para pendukungnya semacam Soroush, kaum mullah dan fikih menyatakan bahwa para penentang konsep dan penerapan *Vilayat-I Fakih* adalah orang-orang “murtad”, karena menyimpang dari konsep yang telah dirumuskan Imam Ayatullah Khomeini. Ayatullah Mohammad Reza Mahdavi-Kani dengan keras menyerang Khatami, yang menurutnya berusaha menundukkan otoritas ulama ke bawah kedaulatan rakyat. “Awas dan hati-hatilah ketika mereka berani berkata bahwa legitimasi *Vilayat-I Fakih* harus berdasarkan tuntutan

²⁷ Abdul Karim Soroush, *Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama*, Mizan, Bandung, 2002 dalam Musthafa Abdul Rahman, *op.cit.*, hal.xxi

dan mandat rakyat, sehingga tak satupun yang tersisa. Adalah bodoh membiarkan penyimpangan ini atas nama kebebasan”²⁸.

1. Kubu Konservatif dalam Struktur Pemerintahan Iran

Periode pertama jabatan Presiden Khatami (1997-2001) banyak diwarnai benturan-benturan politik antara kubu Khatami yang berupaya menghembuskan angin reformasi dan kubu konservatif yang mempertahankan *status quo*. Bahkan sering pula terjadi gesekan langsung antara kubu reformis dan Pemimpin Spiritual Ali Khamenei.

Rasa percaya diri berlebihan dari kubu reformis dan sambutan hangat masyarakat internasional, menyusul kemenangan besar Khatami dengan meraih sekitar 70 persen suara pemilih atas kandidat tangguh dari kubu konservatif Ali Akbar Nateq Nouri pada pemilu 1997 ternyata membawa dampak negatif berupa pengabaian kekuatan institusi-institusi politik yang menjadi pilar Republik Islam.

Di pentas politik internal, kubu reformis meletakkan prioritas program yang mengundang polemik dan reaksi negatif dari kubu konservatif semacam program reformasi politik dengan fokus kebebasan, demokrasi, supremasi hukum, dan konstitusi. Kubu konservatif menganggap imbauan reformasi politik mengancam eksistensi institusi-institusi politik yang menjadi pilar republik Islam Iran itu.

Program reformasi politik yang memicu benturan politik itu, dibayar dengan harga cukup mahal oleh kubu reformis selama

²⁸ Musthafa Abdul Rahman, *ibid.*,

kepemimpinan Presiden Khatami periode pertama. Tak kurang daripada 40 media pro-reformis dibredel, puluhan budayawan dan wartawan dipenjara, dan aksi unjuk rasa mahasiswa diredam dengan kekerasan. Menurut versi kubu Konservatif, kebebasan berbicara, berpendapat dan menerbitkan surat kabar, yang menjadi salah satu program utama pemerintahan Khatami sangat berlebihan dan mengancam ideologi Revolusi Iran²⁹. Pemerintah Khatami tidak bisa bekerja maksimal, lantaran tidak efektifnya kinerja birokrasi pemerintah akibat persaingan tidak sehat antar-institusi negara.

Keberhasilan kubu reformis meraih dukungan besar rakyat melalui kemenangan telak Khatami pada pemilu 1997 itu-serta kemenangan kandidat kubu reformis dalam pemilihan jabatan wali kota pada tahun 1999 dan pemilihan anggota parlemen tahun 2000 menginspirasi kubu konservatif.

Karena kehilangan legitimasi populer inilah, maka kekuatan ulama konservatif bersikukuh pada legitimasi yang diklaimnya merupakan legitimasi yang dikaruniakan oleh Allah. Maka ulama-ulama ini menggunakan klaim legitimasi ini untuk memperkuat posisi mereka pada aparat kehakiman, polisi, tentara dan media massa. Untuk mengganjal kebijakan reformis dan para caleg reformis agar tidak ikut pemilu parlemen mendatang. Dampak perang politik kelembagaan dan

²⁹ibid., hal 68.

perang gerilya politik ini, membuat Iran macet. Penduduk tampaknya mulai kehilangan kepercayaan pada pemilu dan politik.

Kubu konservatif yang tergabung dalam Koalisi Pengikut Garis Imam antara lain beranggotakan Masyarakat Ulama Militan, dan Masyarakat Koalisi Islam yang dikenal sebagai kelompok garis keras. Sebagian pemimpin konservatif sebenarnya tidak keberatan dengan seruan kelompok reformis, asal dilakukan secara bertahap.

Meski demikian, lebih banyak lagi pemimpin konservatif yang khawatir, seruan kubu reformis bakal mengikis nilai-nilai revolusi Iran dan Islam. Pemerintahan Republik Islam Iran memang sedang mengalami dilema struktur, dimana terkadang adanya ketimpangan kekuasaan yang terlalu besar dimiliki salah satu lembaga yang mengakibatkan fungsi lembaga yang lain tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut yang menjadi awal mula terjadinya pertentangan diberbagai kalangan pemerintahan.

Republik Islam Iran memiliki struktur yang relatif berbeda dengan negara Islam pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada pengagungan pada revolusi dan konstitusi sehingga menginovasi bentuk pemerintahan dengan adanya Dewan Pengawal atau Dewan Garda. Dewan ini cukup mendapat perhatian penuh karena fungsi dan perannya dalam pemerintahan Iran.

Semenjak munculnya kutub reformis dan konservatif di permukaan pentas politik Iran menjelang pemilu 1997 lalu, eksistensi dan

peran Dewan Garda selalu menjadi sorotan. Peralnya, hanya Dewan tersebut yang berhak menyeleksi dan kemudian menentukan nama-nama kandidat resmi anggota parlemen dan presiden Iran, setiap kali digelar pemilu. Dalam kerangka paradigma institusi politik semacam itu, maka Dewan Garda secara kelembagaan sesungguhnya tidak memiliki bobot politik yang signifikan. Sebab pengaruh pemimpin spiritual sangat besar terhadap Dewan Garda. Dengan kata lain, Dewan Garda adalah personifikasi dari pemimpin spiritual yang dilembagakan.

Akan tetapi, dalam konteks pertarungan antara kubu konservatif dan reformis di Iran saat ini, Dewan Garda secara politik dirasakan semakin signifikan. Karena, lembaga tersebut menentukan lolosnya nama-nama kandidat anggota parlemen dan presiden. Dominasi kubu konservatif atas Dewan Garda saat ini yang tercermin dari pengaruh pemimpin spiritual dan lembaga yudikatif atas dewan tersebut, membuat kubu reformis banyak melontarkan kritik terhadap kenetralan kinerja Dewan Garda. Bahkan, tidak sedikit dari aktivis kubu reformis menuntut perubahan terbatas terhadap sistem politik di Iran.

Pemilihan di Iran, khususnya penetapan calon presiden (capres) dan calon anggota legeslatif (caleg), dikendalikan sepenuhnya oleh Dewan Pengawal. Badan-badan konservatif di daerah melakukan penelitian mendetail terhadap para capres maupun caleg. Kehidupan sehari-hari para caleg dan keluarganya serta sikap caleg terhadap rejim menjadi perhatian khusus pasdaran, Basij yang memainkan peran sebagai

ujung tombak garis keras dalam urusan disiplin masyarakat dan intelijen. Data hasil penelitian yang mereka lakukan akan dimanfaatkan oleh Dewan Pengawal untuk menjegal caleg-caleg yang tak mereka kehendaki sebagaimana terjadi dalam pemilihan majelis tahun 1992. Disamping itu, tidak semua warga negara Iran diperbolehkan mencalonkan diri sebagai capres atau caleg. Garis keras memiliki daftar mantan anggota partai larang yang dilarang berpartisipasi dalam pencalonan. Proses pencaleg berlangsung rumit dari kementerian penerangan hingga Dewan Pengawal. Proses di Kementerian Penerangan hanya merupakan proses awal dan hasilnya masih akan berubah ketika memasuki tahap pemeriksaan di tingkat Dewan Pengawal. Pada tahapan ini Dewan Pengawal dapat mudah mendiskualifikasi caleg jika mereka menyatakan bahwa kredibilitas caleg tersebut tidak memenuhi persyaratan atau bertentangan dengan prinsip Islam dan konstitusi. Walaupun mereka diberi hak untuk mengajukan protes, tetapi protes ke pengadilan pun tidak akan mengubah isi dari keputusan Dewan Pengawal yang sebenarnya sudah bersifat final.³⁰

Proses perhitungan suara pun berada dibawah kendali Dewan Pengawal. Intervensi Dewan Pengawal dapat masuk ke tahap perhitungan suara jika garis keras menghendaki agar hasil pemilihan di suatu daerah sesuai dengan kehendak mereka. Dengan bantuan pasukan keamanan mereka dapat memaksa personil Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti kehendak Dewan Pengawal. Kontroversi klaim hasil pemilihan

³⁰ Bambang Cipto, *Dinamika Politik Iran : Puritanisme Ulama, Poses Demokratisasi dan Fenomena Khatami*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004 hal.15

antara garis keras dan reformis tidak jarang mengundang bentrok fisik di antara mereka. Dalam pemilihan Majelis tahun 2000 beberapa orang jatuh sebagai korban tindakan kekerasan pasukan keamanan yang mengatasnamakan kubu garis keras.

2. Pandangan Khatami tentang Konstitusi

Sebagai presiden terpilih Khatami dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa ia akan mempertahankan *Vilayat-I Faqih* sebagai pondasi sistem politik Iran serta akan mempertahankan nilai-nilai revolusi sebagaimana ditetapkan oleh Imam Khomeini³¹.

Dalam sebuah forum pertemuan tahunan ke-3 Komite Pengawas Konstitusi pada 26 November 2000, Khatami menjelaskan tentang masih lemahnya supremasi konstitusi di Iran pascarevolusi. Menurut dia, slogan utama Pemerintah Republik Islam Iran adalah menjunjung tinggi konstitusi serta komitmen melaksanakannya. Ia mengatakan, tiadanya komitmen melaksanakan konstitusi dalam suatu masyarakat khususnya masyarakat Iran yang tengah menjalani eksperimen baru dengan dasar legitimasi agama akan menimbulkan bahaya yang bisa menjelma menjadi konflik fisik dan kerusuhan besar³².

Menurut tokoh reformis Iran itu, menjunjung tinggi konstitusi dan komitmen melaksanakannya secara benar adalah merupakan salah satu poin obsesi pemerintahnya dan juga salah satu janji kampanyenya ketika itu. Ia menegaskan, konstitusi itu buatan manusia, dan ketika disahkan

³¹ David Menashri, *Post-Revolutionary Politics in Iran : Religion, Society and Power*, Frank Cass Publishers, London and Oregon, 2001, hal. 91., dalam Bambang Cipto., op.cit hal. 58

³² www.kompas.com, 5 juni 2001

sebagai konstitusi, maka ia menjadi dasar negara serta sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan rakyat serta hubungan rakyat dan pemerintah.

Ia juga mengatakan ;³³

“Revolusi Islam di Iran memperoleh kemenangan berkat keterlibatan semua rakyat, dan kemudian wakil dari rakyat tersebut membuat konstitusi. Jika kita ingin kebebasan maka konstitusi telah menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat. Pemerintah harus bertanggung jawab pada rakyat, dan hal ini telah ditegaskan dalam konstitusi,”

“Pemerintah bertolak dari aspirasi rakyat. Organ-organ pemerintah dari presiden hingga pegawai bawahan merujuk pada pendapat rakyat. Hal itu juga ditegaskan dalam konstitusi. Jika rakyat tidak menerima pemerintah maka konstitusi telah menegaskan tentang aturan main suksesi secara damai”

“Pemerintah bertolak dari aspirasi rakyat. Organ-organ pemerintah dari presiden hingga pegawai bawahan merujuk pada pendapat rakyat. Hal itu juga ditegaskan dalam konstitusi. Jika rakyat tidak menerima pemerintah maka konstitusi telah menegaskan tentang aturan main suksesi secara damai”

“Sekarang, kecenderungan yang menggejala di dunia adalah pemerintahan rakyat menjadi pilihan. Semua bangsa dan pemerintah mengadopsi pemikiran itu. Hak dasar semua manusia biasa adalah penentuan nasibnya berada di tangannya sendiri,”

“Sayyidina Ali menyatakan, rakyat memiliki hak-hak terhadap pemerintahnya. Bagian dari hak tersebut ialah kebebasan memberi kritik dan saran,”

“Yang jelas sekarang, suara kalian adalah segala-galanya dan merupakan lambang kemenangan rakyat. Tidak seorang pun berada di atas hukum. Kami menghendaki pemerintahan demokrasi yang mengakui eksistensi oposisi, memelihara lembaga-lembaga sipil, partai politik dan media massa,”

Poin penting lain dari pidato Khatami adalah mengenai isu menjaga kehormatan individu serta hak asasi manusia. Menurut Presiden Iran itu, bagian dari kekuatan revolusi Iran ialah memberi hak pada rakyat menentukan nasibnya sendiri. Ia memberi contoh Sayyidina Ali Bin Abi Thalib (menantu Nabi Muhammad Saw) yang mengumandangkan syiar demi kemaslahatan rakyat ketika berada di puncak kekuasaan. Khatami.

3. *Vilayat-I Faqih* dan Demokrasi.

³³ *ibid.*,

Banyak anggapan bahwa doktrin *Vilayat-I Faqih* dinilai bertolak belakang dengan demokrasi, dalam hal ini berarti lebih khusus kaitannya bahwa ajaran Islam selalu bertentangan dengan demokrasi. Anggapan ini muncul ketika dilihat dari adanya pendekatan yang menggambarkan dalam struktur ajaran, doktrin ini maupun Islam secara umum memiliki nilai yang tidak sesuai dengan demokrasi, seperti :

Pertama, berkaitan dengan asas 'tinggal landas' dari sikap berkiblat kepada negara-negara barat dan menganggapnya sebagai sumber dan standar kebaikan dan kebenaran bagi keseluruhan umat manusia, bahkan merupakan lembaga khusus yang dapat mengeluarkan Surat Kelakuan Baik bagi Dunia Ketiga. Inilah sikap yang berlawanan dengan menekankan perlunya penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai-nilai ideal yang merupakan produk dari pengalaman manusia, dimana semua manusia dapat bertemu, dengan anggapan bahwa mereka adalah sama dan sederajat. Bukan posisinya sebagai pelajaran tentang etika atau sebagai syarat kulturasi, yang diharuskan oleh seseorang yang lebih kuat kepada yang lebih lemah, penindas kepada tertindas. Sehingga Islam sebagai peradaban yang dimusuhi oleh barat dalam arti luas dianggap tidak sesuai dengan aturan internasional yang telah menjadi trade mark bagi barat dapat diartikan bertolak belakang dengan apa yang telah dihadirkan oleh barat.³⁴ Demokrasi identik dengan the *Western Christian Connection*, karena demokrasi memang lahir dan tumbuh di

³⁴ Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani*, Mizan, Bandung, 1996. Hal.157

lingkungan kultur Barat yang Kristen. Oleh sebab itu, demokrasi tampak “sulit berkembang” di lingkungan kultur yang non-Barat dan non-Kristen seperti Islam atau Arab. Di samping itu, sekurang-kurangnya terdapat dua kendala lain bagi berkembangnya demokrasi di negara-negara Islam. Pertama, di kalangan Islam sendiri belum ada kesepakatan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Kedua, proses demokratisasi di negara-negara Islam sedikit banyak juga tergantung pada faktor eksternal. Artinya, keberhasilan atau kegagalan proses demokratisasi tergantung dari apakah negara-negara di luar kawasan ini, khususnya negara-negara Barat sendiri, mendorong atau justru menghambat demokratisasi.³⁵ Permasalahan ini bisa dimasukkan dalam “konflik peradaban”. Dewasa ini, baik dari segi kultur, politik, maupun ekonomi, Barat mendominasi dunia. Sedangkan peradaban lain dipandang sebagai marginal. Kebangkitan Islam dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan peradaban Barat, terutama sesudah runtuhnya komunisme. Dalam situasi seperti tersebut, kekuatan-kekuatan politik sekuler di negara-negara Islam mempunyai persamaan kepentingan dengan pihak Barat dalam hal menolak atau menentang validitas oposisi gerakan Islam. Padahal menolak hak bersuara bagi oposisi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Namun, anehnya mereka yang menolak oposisi justru menuduh gerakan Islam sebagai anti-demokrasi.

³⁵ Riza Sihbudi, *Islam, Radikalisme, dan Demokrasi*, dalam http://www.swaramuslim.net/more.php?id=2331_0_1_0_m

Kedua, adanya anggapan bahwa masyarakat Islam memiliki kecenderungan terbelakang, sehingga dalam mengaplikasikan ajaran-ajarannya cenderung konservatif, sedangkan demokrasi dikenal sebagai sebuah pemikiran baru yang modern maka sangat bertolak belakang dengan ajaran-ajaran yang ada dalam Islam.

Ketiga, anggapan bahwa ajaran Islam bagai tirani bagi pemeluknya sehingga tidak memberi kebebasan bagi pemeluknya untuk melakukan hal-hal yang dinilai sebagai keinginan pribadi, semua dianggap sebagai keinginan Tuhan. Sehingga dinilai sangat kompatibel dengan demokrasi yang unsur utamanya adalah kebebasan. Bahkan sayyid Qutb seorang sunni dan teoretisi dan tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin yang dieksekusi rezim Mesir (1966), mengatakan sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran. Ia percaya bahwa syariat sudah sangat lengkap sebagai suatu sistem moral dan hukum, sehingga tidak diperlukan legislasi yang lain.³⁶ Pemikir besar Syiah Iran Sayyid Muhammad Hussein Thabathaba'i termasuk yang menganut aliran bahwa Islam dan demokrasi tidak bisa dirujukkan. Ia mengingatkan, "dalam kelahirannya, setiap agama besar selalu bertentangan bukannya menyesuaikan diri dengan kehendak mayoritas".³⁷

Keempat, masalah konflik kekuasaan. Dewasa ini, negara-negara Islam umumnya dikuasai elite politik sekuler, tapi mereka mendapat

³⁶ *ibid.*,
³⁷ *ibid.*,

tantangan yang semakin meningkat dari gerakan Islam. Dalam beberapa kasus, gerakan Islam berhasil mengambil alih kekuasaan, atau berbagi kekuasaan dengan elite politik sekuler. Bisa dimengerti jika dalam pertarungan kekuasaan, elite sekuler takut pada gerakan Islam.³⁸

Namun Iran sebagai salah satu negara Islam yang tentunya meletakkan pondasi negaranya pada ajaran Islam, telah membuktikan pada dunia Internasional bahwa Iran bisa tetap berjalan dengan doktrin negaranya yang bersandar pada ajaran Islam dengan menerapkan demokrasi secara bersamaan.

Kalau diruntut sejarahnya, demokrasi baru masuk dalam khazanah pemikiran Islam dan dianggap sebagai nilai yang baik, baru pada akhir paro abad ke-19. Saat negara-negara Islam ketika itu di seluruh belahan bumi kondisinya nyaris serupa: bergumul dengan kolonialisme, ditindas, dan diperintah oleh penguasa atau raja tiran. Dalam kondisi demikian, mereka mendengar gagasan demokrasi yang berasal dari Barat, yang menaruh penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, menekankan kebebasan pendapat dan partisipasi rakyat dalam mengambil keputusan. Mulailah mereka berbicara mengenai demokrasi sambil mengatakan bahwa sesungguhnya Islam itu demokratis, karena Islam mengakui hak-hak asasi manusia. Buku-buku yang ditulis pemikir Islam pada permulaan

³⁸ *Harian Kayhan International*, 23 Januari 1992.

abad ke-20 yang membicarakan Islam dan demokratis memandang demokrasi sebagai sesuatu yang positif.³⁹

Waktu itu demokrasi diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan, disamping diartikan juga sebagai persamaan di depan hukum. Istilah keadilan baru diartikan sebatas persamaan atau boleh jadi keadilan didefinisikan sebagai persamaan.

Di Barat sendiri, sebelum Amerika menyatakan kemerdekaannya, demokrasi itu tidak populer. Baru setelah Revolusi Perancis menggulingkan kekuasaan yang Tiranis, konon mengilhami Kemerdekaan Amerika, istilah ini baru populer, meskipun pada waktu Revolusi Perancis itu sendiri kata demokrasi tidak disebut-sebut. Di situ hanya disebutkan idiom-idiom *egalite*, *fraternite*, *liberte* (persamaan, persaudaraan, dan kebebasan). Boleh jadi karena istilah demokrasi itu sendiri sejak zaman Aristoteles dan Plato, sampai Abad Pertengahan hingga Revolusi Perancis, tidak mempunyai arti yang baik. Demokrasi dalam kurun ini merupakan istilah untuk pemerintah massa yang bodoh, sehingga tidak begitu menarik minat orang. Baru ketika Amerika muncul dan melemparkan istilah demokrasi yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, istilah demokrasi yang kemudian menyebar ke seluruh dunia, istilah demokrasi memiliki makna positif; sehingga siapa saja yang menyebut negerinya sebagai negeri yang demokratis. Asal tahu saja,

³⁹ Yamani.,op.cit hal.19-20

negeri komunis pun menyebut dirinya negeri demokrasi seperti Republik Demokrasi Korea, Republik Demokrasi Vietnam, dan sebagainya.⁴⁰

Ketika demokrasi memiliki muatan makna positif inilah orang-orang Islam berbicara bahwa Islam itu demokratis. Oleh karena itu, umatnya harus memperjuangkan demokratisasi. Menyebut Islam itu demokratis sebenarnya hanya untuk menyederhanakan perjuangan Islam yang terlalu panjang kalau disebut satu-persatu, seperti Islam itu memperjuangkan keadilan, menuntut perdamaian, dan seterusnya. Untuk menyederhanakannya, dikatakan Islam itu demokratis.

Pada perkembangan berikutnya, istilah demokratis itu sendiri mengalami dinamika, karena ada dialektika dengan *social conditioning* dan *cultural setting*. Istilah demokrasi menjadi penuh embel-embel seperti demokrasi terpimpin, demokrasi organik Franco di Spanyol, demokrasi sosialis Nasser di Arab, demokrasi Pancasila, dan sebagainya. Menaruh predikat atau embel-embel di belakang istilah demokrasi ini menyebabkan makna demokrasi yang mulanya positif itu menjadi bias dan lama-kelamaan istilah itu menjadi tidak menarik. Karena demokrasi yang ditempel embel-embel itu tidak lain hanya mengaburkan esensi demokrasi itu sendiri.

Belakangan, para pemikir Islam tidak lagi menggunakan istilah demokrasi dengan alasan pengertiannya terlalu kabur. Tema demokrasi yang selama ini dipakai, diganti dengan tema tauhid. Tauhid itu sendiri

⁴⁰ *ibid.*,

berarti pengesaan Tuhan, suatu keyakinan bahwa hanya Tuhan yang besar. Semua manusia sama dihadapan Tuhan. Idiom-idiom demokrasi, seperti konsep kebebasan, persamaan, dimasukkan dalam tema tauhid. Dalam tauhid, ada kebebasan manusia, ada pengakuan bahwa satu kelompok manusia tidak boleh menindas kelompok yang lain. Bisa dimaklumi kemudian jika buku-buku mutakhir para pemikir Islam, kecuali pemikir Indonesia, tidak lagi mengagung-agungkan istilah demokrasi, melainkan meluaskan makna tauhid.

Demokrasi Aspek	Demokrasi barat	Vilayat-I Faqih	Demokrasi Khatami
Kebebasan	Tak terbatas	Tak ada kebebasan	Kebebasan yang terbatas
Partisipasi penduduk dalam memilih pemimpin	Tinggi hampir 100%	Tidak ada, karena ditunjuk berdasarkan kualifikasi ketaatan kepada syari'ah	Partisipasi penduduk digunakan untuk memilih dewan ahli yang akan memilih sang pemimpin
pemilihan umum secara kompetisi dari sejumlah kandidat	Multiparty	Singleparty	Biparty
Pemerintahan mengakui kebebasan hak sipil dan politik	Ya	Tidak	Ya

4. Evaluasi 4 Tahun Pertama Pemerintahan Presiden Khatami

Realita itulah yang dirasakan pemimpin kubu reformis Iran Mohammad Khatami, selama menjabat presiden negeri itu dalam periode empat tahun terakhir ini. Betapa tidak, Pada kampanye pemilu empat tahun lalu, Khatami berjanji menciptakan masyarakat madani, menegakkan supremasi hukum dan konstitusi, menjamin kebebasan, dan menggulirkan roda reformasi. Janji menggiurkan dari Khatami itu membuat 20 dari 29 juta pemilih, atau sekitar 70 persen warga Iran yang memiliki hak suara waktu itu, memberi suara untuk Khatami. Ia pun berhasil meraih kemenangan secara gemilang dan bersejarah atas kandidat tangguh dari kubu konservatif, Ali Akbar Nateq Nouri.

Namun, empat tahun kemudian kenyataan berbicara lain. Ternyata program pemerintah Presiden Khatami banyak kandas di tengah jalan. Bahkan puncak pertarungan kubu reformis dan konservatif terjadi pada masa kepemimpinan Khatami. Tampaknya, kekalahan memalukan kandidat andal Ali Akbar Nateq Nouri pada Pemilu 1997 menyemai rasa dendam dari kubu konservatif. Faktor itulah yang menyebabkan terjadinya pembredelan lusinan media massa pro-reformis, penangkapan tokoh-tokoh reformis, dan pengganjalan berbagai program pemerintah Khatami.

Puncak kekecewaan Khatami adalah ketika ia secara mengejutkan mengakui secara jujur di depan forum pertemuan tahunan ke-3 Komite Pengawas Konstitusi pada 26 November 2000 bahwa dirinya selama 3,5

tahun menjabat presiden tanpa memiliki otoritas yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan konstitusi.⁴¹

Tatkala Khatami menyampaikan ketidakberdayaannya itu, pada saat yang sama ia juga menjelaskan bahwa seorang presiden telah melakukan sumpah jabatan dengan janji atas nama Tuhan dan bangsa untuk menjaga konstitusi, seraya berjanji pula akan memelihara kemerdekaan, kebebasan, dan keamanan perbatasan.

Menurut Khatami, Presiden Iran tidak memiliki kemampuan untuk mencegah aksi pelanggaran konstitusi. Karena itu, agenda mendesak buat Presiden Iran mendatang adalah menghilangkan hambatan dan kesamaran sistem pembagian kerja, sehingga seorang presiden mampu menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan amanat konstitusi yang diembannya setelah melakukan sumpah jabatan. Khatami juga mengatakan ;⁴²

“Saya menegaskan di depan kalian bahwa saya tidak bisa memberi laporan pertanggungjawaban secara menyeluruh kepada rakyat langsung, tetapi hanya dapat memberi laporan pada pemimpin spiritual dan Majelis Syura (lembaga legislatif). Faktor yang mencegah saya memberi laporan langsung pada rakyat adalah demi menjaga stabilitas masyarakat,”

Dalam forum tersebut, Khatami menjelaskan tentang masih lemahnya supremasi konstitusi di Iran pascarevolusi. Menurut dia, slogan utama Pemerintah Republik Islam Iran adalah menjunjung tinggi konstitusi serta komitmen melaksanakannya. Ia mengatakan, tiadanya komitmen melaksanakan konstitusi dalam suatu masyarakat, khususnya

⁴¹ *ibid.*,
⁴² *ibid.*,

masyarakat Iran yang tengah menjalani eksperimen baru dengan dasar legitimasi agama, akan menimbulkan bahaya yang bisa menjelma menjadi konflik fisik dan kerusuhan besar.

Pengakuan jujur Khatami di depan forum pertemuan Komite Pengawas Konstitusi itu segera memunculkan polemik cukup alot beberapa bulan sesudahnya tentang mandat konstitusional Presiden Iran.

Sedangkan menurut Ali Hashemi (anggota legislatif), ada dua kemungkinan dari tujuan Khatami menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki mandat yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan konstitusi itu. *Pertama*, Khatami menginginkan kekuasaan konstitusional lebih luas seperti layaknya seorang presiden dalam sistem negara modern. *Kedua*, Khatami ingin lepas tanggung jawab dari kelemahan pemerintahannya selama empat tahun terakhir ini, dengan cara menyampaikan terus terang pada publik bahwa dia tidak memiliki otoritas yang cukup sebagai presiden sehingga rakyat harus sadar dan jangan terlalu kecewa.

Hashemi menghimbau agar Presiden bekerja sama dengan lembaga legislatif dan yudikatif, mengadakan pembicaraan khusus membahas efektivitas konstitusi di Iran. Hasil pembicaraan itu kemudian dilaporkan pada pemimpin spiritual dan Dewan Garda guna mencari kemungkinan adanya kompromi, terutama menyangkut hubungan Presiden dan pemimpin spiritual.

Mantan hakim Sayyid Muhammad Hussein Musavi mengatakan, problema konstitusional di Iran pascarevolusi adalah karena adanya penegasan kekuasaan mutlak bagi *wali fakih* (pemimpin spiritual). Kalimat mutlak tersebut, lanjut Musavi lagi, memberi mandat pada *wali fakih* untuk bisa ikut campur langsung dalam segala urusan. Musavi menjelaskan, Bab 57 dari konstitusi Iran menegaskan, otoritas lembaga legislatif, lembaga yudikatif, dan lembaga eksekutif berada di bawah pengarahan *Wali Fakih* yang mutlak.

Setelah muncul polemik tentang isu efektivitas konstitusi itu, Khatami kembali menyampaikan secara panjang lebar mengenai pikiran-pikiran demokrasi serta hambatan realisasinya dalam forum parlemen (Majelis Syura), beberapa hari sebelum ia mencalonkan diri lagi sebagai presiden untuk periode kedua.

Pada forum tersebut Khatami juga menyampaikan beberapa poin penting yang sebelumnya menjadi obsesi pemerintah dan juga janji kampanyenya, hingga rakyat sadar atas hal yang terjadi sebenarnya. Salah satu poin tersebut, menurut tokoh reformis Iran itu, adalah menjunjung tinggi konstitusi dan komitmen melaksanakannya secara benar. Ia menegaskan, konstitusi itu buatan manusia, dan ketika disahkan sebagai konstitusi, maka ia menjadi dasar negara serta sebuah perjanjian yang mengatur kehidupan rakyat serta hubungan rakyat dan pemerintah. Presiden Iran tersebut kemudian mengkritik kebebasan di negerinya yang masih mengalami pemasungan. Menurut Khatami, keterbukaan budaya,

ilmu pengetahuan, dan fasilitas penyiaran radio, televisi, dan media massa cetak yang tak terbatas merupakan simbol kemajuan suatu bangsa. Namun sebagian media cetak yang bisa terbit pada masa perang dulu (perang Irak-Iran) justru dibredel pada era keterbukaan ini.⁴³

Ia menegaskan, tidak rela dibredelnya sebuah surat kabar dengan kedok melecehkan kepala negara, ia tidak akan ikut campur urusan pengadilan, sebab ketika kesepakatan menerima prinsip demokrasi, berarti harus ada pemisahan wewenang yang tegas antara lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Kalau satu lembaga tersebut mulai ikut campur urusan lembaga lain, maka itu adalah awal dari sebuah kediktatoran.⁴⁴

Ia mengungkapkan pula, konstitusi tidak menegaskan sama sekali akan memberi sanksi disebabkan pelecehan terhadap kepala negara. Jika seseorang mengkritik atau membuat karikatur, lalu dituduh melecehkan kepala negara, maka akan menempatkan media massa selalu dalam keadaan bahaya dan terancam dibredel setiap saat. Dalam forum persatuan mantan anggota parlemen pada hari Minggu 27 Mei 1998 di Teheran, Khatami kembali lagi mengungkapkan ketidakpuasannya untuk tidak mengatakan suatu pemberontakan selama ia menjabat presiden dalam periode empat tahun lalu.

Ia lalu menyatakan, sangat naif apabila seorang pejabat menggerakkan suatu kerusuhan atau ketegangan demi kepentingan

⁴³ www.kompas.com

⁴⁴ *ibid.*,

kelompoknya sendiri atau sekelompok pemuda. “Sudah pasti tidak ada tempat bagi suatu niat baik, buat seseorang yang kerjanya memicu kerusuhan. Bagi kita harus sabar menunggu dan bertindak secara tenang, untuk menunggu suatu hasil,” katanya.⁴⁵

Pada forum kampanye terbuka beberapa hari lalu yang merupakan satu-satunya kesempatan yang diberikan kepadanya, Khatami menegaskan di depan para pendukungnya bahwa jalan masih panjang dan hambatan kerikil masih besar, seraya menyerukan kepada mereka agar tidak memberi suara pada seorang kandidat karena hubungan emosional, tetapi agar memilih jalan demokrasi dan reformasi dengan penuh kesadaran.

Presiden Iran itu lalu mengungkapkan, arus reformasi ternyata sekarang tidak bisa dicegah dan semua orang berteriak pentingnya reformasi. “Padahal, empat tahun lalu mereka mengatakan bahwa reformasi bertentangan dengan agama dan melawan revolusi. Tetapi, sekarang mereka bicara pentingnya reformasi, dan bahkan menuduh saya tidak mampu memenuhi janji reformasi pada kampanye pemilu lalu,” lanjut Khatami lagi.⁴⁶

“Yang jelas sekarang, suara kalian adalah segala-galanya dan merupakan lambang kemenangan rakyat. Tidak seorang pun berada di atas hukum. Kami menghendaki pemerintahan demokrasi yang mengakui

⁴⁵ *ibid.*,

⁴⁶ *ibid.*,

eksistensi oposisi, memelihara lembaga-lembaga sipil, partai politik dan media massa," tegas Khatami lebih lanjut.

Dari proses jalannya kampanye pemilu Iran, bahkan beberapa bulan sebelumnya, menunjukkan adanya tradisi transparansi di kalangan para pejabat Iran. Pengakuan jujur dan terus terang Presiden Khatami dalam berbagai forum tentang ketidakberdayaannya menegakkan konstitusi, sulit ditemukan di negara lain, apalagi di negara dunia ketiga.

Sebuah paradigma politik dilematis memang sedang terjadi di Iran saat ini, bahkan paling rumit semenjak revolusi tahun 1979. Di satu sisi, reformasi memang sudah menjadi tuntutan berbagai lapisan masyarakat di Iran. Namun, di sisi lain, perangkat-perangkat negara belum siap sepenuhnya menciptakan kondisi yang kondusif bagi bergulirnya arus reformasi itu.

Situasi dilematis tersebut tentu mempersempit gerak siapa pun Presiden Iran selanjutnya. Karena itu, memerlukan penanganan khusus yang memerlukan waktu, sikap kenegarawanan, dan kesabaran semua pihak sehingga terhindar dari konflik berdarah yang hanya merugikan semua pihak, dan tentunya Republik Islam Iran yang sudah berusia 25 tahun itu.